

TGIPF dan Komnas HAM Beda soal Rekaman CCTV Tragedi Kanjuruhan

JAKARTA (IM) - Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan menemukan adanya rekaman CCTV di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, yang dihapus. Namun Komnas HAM menyebut CCTV tidak ada penghapusan. Cuman ada masalah teknis saja.

TGIPF Tragedi Kanjuruhan menemukan rekaman CCTV di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, yang dihapus. Polisi dan Komnas HAM turun tangan melakukan pengusutan.

Disebut bahwa rekaman yang dihapus itu berasal dari CCTV di lobi utama dan area parkir dengan durasi 3 jam 21 menit. Temuan itu terungkap dalam laporan TGIPF Tragedi Kanjuruhan yang telah dilaporkan ke Presiden Jokowi pada Jumat (14/10) lalu.

TGIPF menyampaikan mulanya CCTV merekam pergerakan rangkaian Barracuda yang akan melakukan evakuasi Tim Persebaya. Namun, CCTV tersebut hanya memperlihatkan rekaman dengan durasi 1 jam 21 menit. Sedangkan, durasi 3 jam 21 menit berikutnya hilang.

"Tetapi rekaman CCTV tersebut mulai dari pukul 22.21.30 dapat terekam dengan durasi selama 1 jam 21 menit, dan selanjutnya rekaman hilang (dihapus) selama 3 jam, 21 menit, 54 detik, kemudian muncul kembali rekaman selama 15 menit," lapor TGIPF.

Akibatnya hilangnya durasi rekaman itu menghambat tugas dalam mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi pada tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang. TGIPF pun mengaku tengah berupaya meminta rekaman lengkap ke Polri.

Anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan dari Kemenko Polhukam, Irjen Armed Wijaya, mengungkapkan hal tersebut saat mendatangi rumah

keluarga korban yang batal mengajukan autopsi. Setelah mendengar penjelasan terkait dugaan hilangnya rekaman CCTV Stadion Kanjuruhan selama 3 jam, TGIPF meminta Polri memberikan jawaban tertulis penyebab terhapusnya rekaman CCTV itu.

"Kami akan minta jawaban tertulis oleh pihak kepolisian. Kalau memang betul-betul dari internet (gangguan) harus dijawab secara tertulis dan ini tindak lanjutnya dari TGIPF seperti apa? Ya nanti harus secara resmi," tegasnya.

Komnas HAM lalu mengecek CCTV di Kanjuruhan. Komnas HAM mengungkapkan rekaman tersebut utuh dan hanya masalah teknis.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam datang ke Stadion Kanjuruhan guna mengecek langsung rekaman CCTV. Langkah ini menyusul adanya dugaan rekaman CCTV Kanjuruhan berdurasi 3 jam yang dihapus.

Dari serangkaian penjelasan langsung oleh teknis, Anam menegaskan ada dua titik CCTV yang awalnya diduga hilang atau dihapus ternyata disebabkan masalah teknis.

"Intinya adalah CCTV yang di titik parkir yang katanya hilang atau dihapus 3 jam. Itu tadi dijelaskan sama teknisnya itu akibat kameranya yang di titik parkir itu diganti pada hari Jumat (H-1). Hari Jumat itu ada pergantian CCTV," bebernya.

Dia memastikan tidak ada pergantian DVR tersebut. Anam menjelaskan bahwa memang terdapat masalah teknis di CCTV di Pintu 16 yang mengarah pada arah parkir, di mana dikatakan bahwa video tersebut blank. Dia memastikan bahwa hal ini hanya masalah teknis, karena terdapat pergantian pada satu hari sebelum pertandingan laga Arema FC vs Persebaya. ● me

2 Polhukam

FOTO/ANT



JALAN SEHAT MEMPERINGATI HARI SANTRI NASIONAL DI SIDOARJO

Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (kanan) bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kedua kanan), dan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (kiri) menghadiri jalan sehat 'Mlaku Sarungan' pada peringatan Hari Santri Nasional di Alun Alun Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (23/10). Jalan sehat bertema Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan itu diikuti ribuan warga dan santri dari sejumlah ponpes di Sidoarjo.

Tak Terima Divonis 3 Tahun, Direktur PT KMI Malah Sebar Hoax Melalui Kuasa Hukumnya

PT TGM menilai kuasa hukum PT KMI, Richard William, telah memutarbalikan fakta dan tidak memahami perkara yang sedang ditanganinya secara detail.

JAKARTA (IM) - Direktur PT. Kutama Mining Indonesia (KMI) Wang Xiu Juan alias Susi, divonis 3 tahun penjara karena terbukti bersalah menggunakan surat palsu yang dibuat oleh Mahyudin, mantan Direktur Tuah Globe Mining (TGM).

Merasa tak puas terhadap hakim yang menghukumnya 3 tahun penjara, Wang Xiu Juan malah menyebut polisi lakukan kriminalisasi terhadap dirinya. Demikian disampaikan Richard William, selaku kuasa hukum Wang Xiu Juan, dalam siaran pers, baru-bru ini.

Menanggapi hal ini, Hen-

dra Onggo Wijaya SH MH, selaku kuasa hukum PT. Tuah Globe Mining (TGM), dalam siaran persnya, Sabtu,(22/10) menegaskan bahwa para penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, telah benar menerapkan hukum, dan sama sekali tidak melakukan kriminalisasi terhadap Wang Xiu Juan dan Mahyudin.

Hendra Onggo Wijaya, menyebut kuasa hukum Wang Xiu Juan telah memutarbalikan fakta dan tidak memahami perkara yang sedang ditanganinya secara detail karena kuasa hukumnya yang seka-

rang ini adalah kuasa hukum yang kesekian kalinya setelah beberapa kali ganti pengacara. "Duduk perkara ini berawal ketika Mahyudin diberhentikan sebagai Direktur melalui RUPS pada tanggal 6 Mei 2019," katanya.

Kemudian Mahyudin sekitar bulan Juni 2019 membuat dan menandatangani surat keterangan asal barang batu bara mengatasi-namakan TGM agar batu bara tersebut dapat dijual oleh WXJ.

Onggo menyebutkan, menurut Pasal 94 ayat 6 UU No: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah diatur bahwa, seorang direksi efektif berhenti sejak ditutunya RUPS, bukan sejak tercatatnya perubahan di Dirjen AHU.

Onggo membeberkan duduk perkara yang sebenarnya. Perkara antara PT KMI dengan PT TGM, berawal

pemecatan Mahyudin sebagai Direktur melalui RUPS pada tanggal 06 Mei 2019.

Mahyudin sekitar bulan Juni 2019 membuat dan menandatangani surat keterangan asal barang batubara dengan mengatasi-namakan TGM. Tujuannya agar batubara tersebut dapat dijual oleh Wang Xiu Juan. Padahal saat itu Mahyudin sudah dipecat sebagai Direktur PT TGM.

Dsesuai Pasal 94 ayat 6 UU No: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah diatur bahwa seorang Direksi efektif berhenti sejak ditutunya RUPS bukan sejak tercatatnya perubahan di Dirjen AHU.

Lantas mengapa perubahan tersebut baru tercatat di AHU pada 08 Agustus 2019. Padahal peraturan menentukan batas waktu 30 hari. Untuk pemberitahuan kepada Menkumham? Hal itu dikarenakan ada ketidak sesuai data di AHU. Karena ada tindakan Mahyudin yang diduga membuat akta palsu di Sukabumi yang saat ini proses hukumnya yang masih berjalan di Bareskrim, katanya.

Menurut Onggo, bukti yang dimunculkan oleh kuasa hukum Wang Xiu Juan di media Electronik justru patut diduga tidak valid, karena jika

diperhatikan bukti asli yang dimiliki PT. TGM adalah hasil cetak yang dilakukan notaris pada tgl, 16 Agustus 2019.

"Sedangkan bukti yang dipublikasikan oleh Richard William dicetak tgl, 08-Nopember-2019 dengan demikian maka siapa yang "bermain" dan siapa yang punya kepentingan atas perubahan data tersebut, dari SK Menkumham ternyata SK yang dipublikasikan oleh kuasa hukum yang tidak dapat di scan barkodenya.

"Kami memiliki bukti tanda tangan dan tanda jempol Mahyudin yang dicopot sebagai Direktur melalui RUPS dan kami melalui siaran pers ini juga menampilkan bukti perbandingan agar masyarakat dapat menilai siapa yang berbohong. Upaya-upaya propaganda oleh kuasa hukum Wang Xiu Juan di media ini hanyalah upaya agar dapat lolos dari jeratan hukum," jelasnya Onggo Wijaya.

Sebagaimana diketahui, "bahwa Wang Xiu Juan saat ini telah mengajukan upaya hukum Kasasi setelah Pengadilan Tinggi Palangkaraya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menjatuhkan vonis 3 tahun. ● lus

BSSN Ingatkan Jangan Sampai Ruang Siber Indonesia Dijajah

JAKARTA (IM) - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburi meminta supaya seluruh kalangan menjaga kedaulatan ruang siber Indonesia. Generasi saat ini jangan sampai menyia-nyaiakan perjuangan para pahlawan dan turut menjaga ruang siber Indonesia.

"Kita pernah dijajah 350 tahun di darat, laut, dan udara, jangan sampai kita terulang dijajah di ruang siber," kata Hinsa dalam Pelatihan Cyber Security untuk Santri Pesantren di Hotel Millennium, Jakarta, Sabtu (22/10).

Menurut Hinsa, kalangan muda-mudi diharapkan fokus belajar dan bijak dalam menyaring informasi yang didapatkan dari ruang siber. Sebab arus informasi dari dunia siber sangat deras, baik yang bisa dipastikan kebenarannya atau yang hanya kabar bohong atau disinformasi.

Menurut Hinsa, derasnya arus informasi melalui dunia siber saat ini tidak bisa dihindarkan karena menjadi

bagian dari perkembangan manusia.

"Yang sedang terjadi sekarang adalah perang siber dan informasi ini terjadi karena perkembangan teknologi dia menjadi center of gravity dari dua evolusi sebelumnya yakni pertumbuhan manusia dan peperangan," ucap Hinsa.

Peradaban dunia saat ini, menurut Hinsa, masuk ke dalam tahap evolusi peperangan generasi padat teknologi di mana hanya dikuasai negara-negara yang memiliki sumber daya. "Pandemi Covid-19 menjadi titik balik begitu banyaknya aktivitas masyarakat memanfaatkan ruang siber dan mempercepat digitalisasi dalam kehidupan," ujar Hinsa.

Hinsa menilai, kalangan santri dengan jumlah yang sangat besar memiliki peran penting untuk ikut berjuang mengamankan ruang siber Indonesia dari ancaman.

"Menjadi penting para santri mulai menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang TIK, tidak bisa hanya dengan modal

semangat," ucap Hinsa.

Ia pun berpesan kepada santri untuk mengaplikasikan apa yang sudah diajarkan dalam pesantren dalam kehidupan sehari-hari termasuk ketika berinteraksi serta menggunakan ruang siber.

1,6 Miliar Serangan Badan Intelijen Negara mencatat serangan siber terhadap Indonesia terus meningkat signifikan, bahkan hingga mencapai 1,6 miliar pada 2021. Hal itu diungkap oleh Direktur Telematika BIN Nur Djatmiko.

Dia mengatakan, jumlah serangan siber di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

"Jumlah serangan siber di Indonesia semakin meningkat dari tahun 2020 itu sekitar 496 juta. Dalam satu tahun di tahun 2021 menjadi 1,6 miliar ini betul-betul luar biasa ini peningkatannya," ujar Nur Djatmiko dalam Pelatihan Cyber Security untuk Santri Pesantren di Hotel Millennium, Jakarta, Sabtu (22/10). ● han



FOTO: ANT

BANTUAN AIR BERSIH UNTUK WARGA DI JEMBRANA BALI

Warga antre untuk mendapatkan air bersih di Dusun Kedisan, Desa Yehembang Kauh, Jembrana, Bali, Minggu (23/10). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyalurkan bantuan 4.000 liter air bersih kepada warga di dusun tersebut karena mengalami krisis air akibat pipa saluran air putus diterjang banjir bandang yang terjadi pada Minggu (16/10).

PAN Sebut Presiden Jokowi Tahu Nama Capres dari KIB

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah mengetahui bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Namun, koalisi yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP, belum ingin mengungkapkan nama calon presiden yang akan diusung partai koalisi tersebut pada Pilpres 2024 mendatang ke publik.

"Iya Presiden tahu nama-nama capres yang diusulkan dari PAN, Golkar, dan PPP. Bahkan publik juga tahu," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Minggu (23/10).

Viva Yoga mengatakan, dari daftar nama bacapres itu, nantinya diputuskan dalam rapat internal KIB. Proses penentuan dilakukan secara mafakat.

"Penentuan capres dari KIB adalah halaman terakhir dari proses politik yang memwarnai Pilpres 2024. Setelah itu akan dibuka halaman baru untuk perjuangan di kampanye agar paslon yang diusung

KIB menang," ujarnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, calon presiden (capres) harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Untuk itu, kata Airlangga, KIB yang beranggotakan tiga partai yaitu Golkar, PPP dan PAN, menilai bahwa calon presiden yang bakal diusung harus berkecimpung di partai politik.

Kendati begitu, Airlangga mengatakan KIB belum ada rencana untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Hingga saat ini, pembahasan mengenai hal tersebut belum dilakukan.

Namun demikian, kata Airlangga, pihaknya telah menyebarkan beberapa nama capres ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita belum dibahas di internal kita," kata Airlangga di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Pusat, Sabtu (22/10). ● han



FOTO: ANTARA

PEMBUKAAN MINI MARKET KETAHANAN PANGAN

Anggota DPR RI Dewi Aryani (kiri) menunjukkan ikan kemasan usai pembukaan Mini Market Ketahanan Pangan Online Offline (Mami Kepoo) di Kelurahan Kemandungan, Tegal, Jawa Tengah, Minggu (23/10). Mami Kepoo yang dibuka oleh Anggota DPR RI Dewi Aryani dengan menyediakan berbagai macam sembako di antaranya beras, telur, dan minyak goreng tersebut sebagai upaya mendorong program pemberdayaan ekonomi kerakyatan.